



Bab4

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah telah memasuki babak baru dalam kerangka pencapaian pembangunan jangka panjang daerah maupun nasional. Pembangunan periode 2016-2020 ini akan lebih banyak memberikan penyesuaian pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebelumnya mengingat pada periode 2016-2020 merupakan tahapan pembangunan ketiga pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025. Perencanaan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2020 lebih menekankan pada pematapan kemandirian dan ketahanan ekonomi sebagai dasar pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sehingga RKPD tahun 2016 harus menjadi tonggak pertama dalam merealisasikan tujuan pembangunan jangka menengah tersebut.

Sebagai dokumen transisi pemerintahan antar perencanaan jangka menengah, RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 merupakan awal pembangunan jangka menengah dan memiliki kelebihan tersendiri dalam mengelola capaian tujuan pembangunan daerah. Penyusunan program dan kegiatan yang baru merupakan salah satu kelebihan pada RKPD periode pertama pembangunan jangka menengah. Meskipun begitu, evaluasi positif terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan pada pembangunan periode sebelumnya dapat dilaksanakan kembali dengan berbagai penyempurnaan agar memiliki optimalisasi pembangunan.

Prioritas pembangunan merupakan berbagai poin penting dalam agenda-agenda pembangunan yang penyusunannya berkaitan langsung dalam pencapaian target perencanaan pembangunan daerah. Dalam implementasinya, prioritas pembangunan merupakan arah kebijakan yang akan menjadi acuan dalam perumusan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. Sedangkan, rencana program dan kegiatan merupakan implementasi dari sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen program prioritas dan atau gabungan program prioritas. Dalam menyusun berbagai prioritas dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah termasuk rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah agar terjadi sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan yang efisien.



Penyusunan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun *optional* sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 dalam mencapai visi dan misi gubernur melalui tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan tahun 2016;
2. Mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment*;
3. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengantisipasi dan menyelesaikan target-target pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual akan dihadapi pada tahun 2016; serta
5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

4.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2005-2020 TAHAP KE 3 (2016-2020)

Menindaklanjuti berbagai pernyataan diatas bahwa pada penyusunan RKPD tahun 2016 ini merupakan tahun transisi RPJMD dan pada tahun 2016 ini dokumen RPJMD belum tersusun. Sehingga dalam penyusunan RKPD tahun 2016 dalam menentukan prioritas daerah merujuk dan mempertimbangkan dari prioritas pembangunan daerah jangka panjang yang tertuang pada dokumen RPJPD tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, **visi pembangunan jangka panjang** daerah adalah “Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri dan Adil”. Adapun **misi pembangunan jangka panjang** dalam kerangka pembangunan berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah



2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
5. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
6. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pada dokumen RPJPD sesuai tahapan RPJM ke-tiga (2016-2020) pembangunan daerah ditujukan **untuk lebih memantapkan kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.**



TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPD PROV. KALTENG
TAHUN 2005-2025



Dalam 5 (lima) tahun ketiga ini (2016-2020) prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UMKM serta dunia usaha, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif.
6. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan dalam rangka pengembangan daya saing daerah.
8. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.



9. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan harmonisasi kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan
11. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga
12. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Prioritas pembangunan merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang telah ditetapkan dan menjadi tonggak capaian menuju target sasaran 5 (lima) tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Prioritas pembangunan yang dirumuskan pada perencanaan jangka menengah akan menjadi dasar bagi penyelesaian permasalahan di daerah. Oleh karenanya, perlu adanya integrasi dan sinkronisasi setiap dokumen perencanaan antar periode maupun antar hierarki pemerintah sebagai benang merah agar arah pembangunan tetap berada pada koridor yang sama

Prioritas pembangunan daerah berisikan program dan kegiatan unggulan SKPD dengan skala prioritas paling tinggi (*output&outcome*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan tahun realisasi perencanaan. Dalam menentukan prioritas pembangunan, perlu adanya identifikasi permasalahan pembangunan yang bersifat internal maupun eksternal. Selanjutnya, melalui identifikasi permasalahan akan diketahui faktor penyebab atau pemicu permasalahan secara internal maupun eksternal sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan langkah taktis yakni menyusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program-program prioritas sesuai dengan ketersediaan anggaran dan identifikasi permasalahan terkait dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2016

Dalam dokumen RJPMN 2015-2019 mempunyai beberapa sasaran pokok pembangunan Nasional. Hal ini sesuai dengan tema yang memacu pembangunan nasional yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan dimana rumusan sasaran pokok pembangunan nasional antara lain sebagai berikut:



(1) Ekonomi

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara nasional diarahkan untuk memberikan landasan utama sebagai persiapan keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) dan memasuki era sebagai negara maju berpendapatan tinggi pada Tahun 2030. Dalam mencapai tujuan untuk keluar dari MIT, perekonomian Indonesia harus tumbuh relatif tinggi secara berkelanjutan. Pertumbuhan tersebut diperoleh berlandaskan penguatan struktur ekonomi, melalui penguatan sektor primer dan peningkatan industrialisasi pengolahan di berbagai wilayah sesuai keunggulan wilayah, dan modernisasi sektor jasa didukung oleh ketersediaan layanan infrastruktur yang memadai dan handal. Pertumbuhan tersebut harus bersifat inklusif, antara lain dengan penguatan peranan UKM yang lebih besar, peningkatan jumlah kesempatan kerja, khususnya tenaga kerja produktif (*decent jobs*), dan berkembangnya akses keuangan ke masyarakat (*financial inclusion*). Selanjutnya ketahanan ekonomi juga dibangun di samping terus menjaga stabilitas makro juga dengan terus membangun ketahanan pangan, energi dan air.

(2) Lingkungan

Pencapaian pembangunan di berbagai bidang dilakukan dengan tetap mengamankan kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan yang dicerminkan pada langkah penurunan emisi GRK sebesar 26 persen pada 2019 (dari *Business as usual/BAU*), dan membaiknya Kualitas Lingkungan Hidup. Sasaran ini menggambarkan bahwa pembangunan dilakukan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup dan sekaligus melaksanakan komitmen Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional. Selain itu, kapasitas kelembagaan penanganan bencana pada tingkat nasional dan daerah terus ditingkatkan.

(3) Politik

Sasaran pokok dalam konsolidasi demokrasi adalah meningkatnya kualitas demokrasi substansial, ditandai dengan meningkatnya indeks Demokrasi Indonesia dan tingkat partisipasi politik rakyat pada Pemilu dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019. Sementara itu, sasaran pokok politik luar negeri Indonesia adalah menguatnya kepemimpinan dan peran Indonesia dalam berbagai kerja sama dan forum internasional. Salah satu sasaran penting adalah meningkatnya partisipasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah PBB.



(4) Hukum

Sasaran pokok dalam pembangunan hukum adalah terwujudnya sistem peradilan pidana dan perdata yang efisien, efektif, dan akuntabel bagi pencari keadilan, serta didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas, dan operasional yang memadai. Sasaran juga ditujukan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara. Sasaran dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

(5) Pertahanan dan Keamanan

Sasaran pokok dalam pembangunan sektor pertahanan dan keamanan adalah meningkatnya kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional melalui pemenuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan, peningkatan kepercayaan terhadap Polri, peningkatan kemampuan intelijen, pengamanan wilayah laut dan perbatasan, serta peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.

(6) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

Untuk mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, sasaran pokok penguatan tata kelola adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif, dan efisien, yang pada akhirnya mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

(7) Kesejahteraan Rakyat

Sasaran pokok pembangunan kesejahteraan rakyat tercapainya penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar penduduk di berbagai wilayah sebagai hasil pembangunan yang inklusif. Meningkatnya tingkat kesejahteraan rakyat tidak hanya dilihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat atau penurunan kemiskinan, tetapi juga harus terlihat dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yaitu taraf pendidikan, derajat kesehatan dan gizi masyarakat, serta terciptanya system perlindungan sosial masyarakat yang baik. Masyarakat Indonesia sejahtera yang dibangun juga harus mempunyai karakter dan jati diri bangsa yang kuat serta menjaga dan mengembangkan kebudayaannya.



(8) Kewilayahan

Sasaran pokok dalam pemerataan pembangunan antar wilayah adalah menurunnya tingkat kesenjangan antar-wilayah yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah kabupaten tertinggal, meningkatnya peran wilayah Luar Jawa dalam pembentukan PDRB serta lebih meningkat dan merata pelayanan dasar di berbagai wilayah Indonesia.

(9) Kelautan

Sasaran pokok pembangunan kelautan adalah terwujudnya kedaulatan atas wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi nasional, termanaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi nasional, serta terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut.

Pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 2015-2019 dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Presiden dan Wakil Presiden terpilih mempunyai 2 (dua) ideologi dasar dalam melaksanakan pemerintahan Nasional yaitu Pancasila dan Trisakti. Pancasila merupakan dasar negara yang sama merupakan ideologi bangsa semenjak jaman kemerdekaan, sedangkan Trisakti Presiden dan wakil presiden adalah sebagai berikut:

TRISAKTI:

1. Kedaulatan dalam politik
2. Berdikari dalam ekonomi
3. Kepribadian dalam kebudayaan

Dalam rangka memperkuat pemerintahan agar dapat berjalan dengan sesuai harapan dan dapat mencapai target yang dicapai, maka pada masa pemerintahan tahun 2015-2019 mempunyai Visi, Misi, dan beberapa agenda prioritas yang tercantum sebagai berikut:

VISI:

**"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"**

MISI:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;



3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA** yang rinciannya sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK

1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4 prioritas utama)
2. Memperkuat sistem pertahanan Negara (4 prioritas utama)
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8 prioritas utama)
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen Negara (7 prioritas utama)
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7 prioritas utama)
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6 prioritas utama)



7. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah (11 prioritas utama)
8. Memberdayakan Desa (8 prioritas utama)
9. Melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat (6 prioritas utama)
10. Pemberdayaan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan (7 prioritas utama)
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42 prioritas utama)
12. Berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (5 prioritas utama)

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI

1. Mendedikasikan pembangunan kualitas sumber daya manusia (1 prioritas utama)
2. Membangun kedaulatan Pangan berbasis pada Agribisnis Kerakyatan (4 prioritas utama)
3. Dedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional (9 prioritas utama)
4. Penguasaan sumber daya alam (7 prioritas utama)
5. Membangun pemberdayaan Buruh (10 prioritas utama)
6. Membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional (4 prioritas utama)
7. Penguatan investasi sumber domestic (10 prioritas utama)
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara (8 prioritas utama)
9. Penguatan infrastruktur (40 prioritas utama)
10. Pembangunan ekonomi maritim (9 prioritas utama)
11. Melakukan penguatan sektor kehutanan (14 prioritas utama)
12. Membangun tata ruang dan lingkungan yang berkeberlanjutan (7 prioritas utama)
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan (13 prioritas utama)
14. Membangun karakter dan potensi pariwisata (4 prioritas utama)
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional (8 prioritas utama)
16. Pengembangan industri manufaktur (7 prioritas utama)

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN

1. Mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa (10 prioritas utama)
2. Memperteguh ke-bhineka-an Indonesia dan memperkuat restorasi sosial (5 prioritas utama)
3. Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga (10 prioritas utama)

Dalam menyusun RKPD Kalimantan Tengah tahun 2016 ini selain harus memedomani dokumen perencanaan RPJMN dan RPJPD tetapi juga harus merujuk pada dokumen



perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2016. Hal ini dikarenakan, RKP merupakan penjabaran dari RPJMN yang memiliki arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang lebih spesifik daripada RPJMN. Pada tahun 2016 ini Tema RKP adalah sebagai berikut:

**MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI
PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS**

Tema RKP 2016 ini ingin memfokuskan pembangunan dengan pemenuhan ketersediaan infrastruktur yang menjadi salah satu prasyarat utama untuk melaksanakan pembangunan yang berkualitas. Arti pembangunan yang berkualitas disini adalah membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah. Dengan aktivitas pembangunan tidak merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Sehingga akan menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Kemudian pembangunan infrastruktur ini diperlukan untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan pembangunan.

Sasaran Pokok RKP Tahun 2016 disusun sebagai berikut :

1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.

Sesuai dengan Tema dan Sasaran Pokok RKP Tahun 2016 tersebut, maka **Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Tahun 2016** dititikberatkan pada:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh 6,6 persen;
2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen;
3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0 persen smpai dengan 10,0 persen
4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,2 persen sampai dengan 5,5 persen



4.2.2 Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2015-2019

A. Tema Pengembangan Wilayah Kalimantan

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Pulau Kalimantan, maka tema besar **Pembangunan Wilayah Kalimantan:**

- 1) Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan.
- 2) Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi
- 3) Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.
- 4) Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

B. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan

Tujuan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Adapun sasaran pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.
2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Kalimantan, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran *outcome*: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,85 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11,06 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72,75.



3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Kalimantan, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, serta mewujudkan optimalisasi peran 4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (*buffer*) urbanisasi, serta membangun 4 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan.
4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya kemiskinan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri.
5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat sedikitnya 7 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan 12 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.
7. Sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 45 persen untuk propinsi dan 10 persen untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 35 persen dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40 persen pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan 27 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan; (4) Terlaksananya penggunaan *block grant* (inpres) yang efektif dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah; (5) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50 persen dan S2-S3 sebesar 10 persen; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan sebesar 75 angkatan; (7) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (8) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100 persen; (9) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70 persen; (10) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur) (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara *on-line* di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Timur)
8. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 18 kabupaten/kota sasaran (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangka Raya, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Laut, Kapuas, Kutai Kertanegara, Nunukan) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang memiliki berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.



Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan semakin meningkat yang dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 8,7 persen (2013) menjadi 9,6 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya di Wilayah Pulau Kalimantan.

Berdasarkan penjabaran sasaran pembangunan wilayah Kalimantan diatas serta mempertimbangkan potensi dan sumber daya daerah maka target pembangunanyang merupakan prioritas nasional serta prioritas daerah terdapat tiga sasaran yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Target Kalimantan Tengah dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019

No	Sasaran Nasional	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,1	7,0	7,5	8,2	8,7
2	Tingkat Kemiskinan	6,0	5,8	5,3	4,8	4,3
3	Tingkat Pengangguran	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2

Pada RKP tahun 2016 ini, program/kegiatan pembangunan difokuskan untuk pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) pada RPJMN 2015-2019. Selain itu, program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif dalam kerangka pembangunan wilayah sesuai dengan arah pembangunan wilayah per pulau/provinsi pada RPJMN 2015-2019.Pada Kabinet Kerja (Jokowi-JK), sebagian besar Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) bersifat Lintas Sektor, Lintas Kementerian dan Lintas Wilayah, sebagai contoh pariwisata, kedaulatan pangan, kemaritiman. Oleh karena itu, sangat diperlukan koordinasi perencanaan program/kegiatan lintas sektor/lintas K/L dan lintas wilayah. Dengan demikian koordinasi Perencanaan Multilateral/Multi-Sektor/Multi K/L terhadap masing-masing Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) meliputi:

- 1. Kedaulatan pangan
- 2. Kedaulatan energi
- 3. Kemaritiman



4. Industri/Kawasan Industri
5. Pariwisata
6. Pendidikan
7. Kesehatan
8. Revolusi mental
9. Daerah tertinggal

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

Periode RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2016 berada pada masa tahun pertama RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah ketiga (2016-2021). Sebagai masa transisi dalam memulai perencanaan pembangunan jangka menengah periode baru maka dokumen RKPD 2016 belum dapat mengacu pada RPJMD dikarenakan dokumen RPJMD belum disusun. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD 2016 dapat mengacu pada arah kebijakan atau prioritas pembangunan RPJM Nasional tahun 2015-2019, RKP Nasional 2016 dan Tahap ke tiga RPJP Provinsi tahun 2005-2025.

Dokumen RKPD merupakan tahapan/langkah pelaksanaan dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah. Pada RKPD tahun 2016 merupakan RKPD masa transisi dimana dokumen RPJMD belum disusun maka tema atau agenda pembangunan tahun 2016 ini menyesuaikan dengan tema RKP Nasional 2016 dan prioritas pembangunan RPJPD tahun 2005-2020 tahap ke tiga (2016-2021). Dari pertimbangan tersebut, maka dirumuskan tema atau agenda pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 adalah

**“PERCEPATAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR SEBAGAI MODAL DASAR
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH”**

Sesuai dengan tema pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 tersebut, maka **Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016** adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh 7,7 – 8,2 persen;
2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,5 persen sampai dengan 4,5 persen;
3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 5,2 persen
4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 2,5 persen



Selanjutnya agar dokumen RKPD tahun 2016 sinkron dan selaras dengan dokumen perencanaan Provinsi Kalimantan Tengah yang lain serta bersinergi dengan RKPD tahun-tahun sebelumnya maka dalam penyusunan RKPD tahun 2016 perlu memperhatikan:

- a. Identifikasi target-target pembangunan RPJMD 2010-2015 yang belum tercapai;
- b. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan Tahun 2016;
- c. Identifikasi target-target pembangunan RKPD tahun 2015 yang belum tercapai;
- d. Identifikasi isu strategis dan Kebijakan Nasional (RKP Tahun 2016); dan
- e. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016, prioritas pembangunan mengacu pada Prioritas Pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025. Prioritas pembangunan dalam penyusunan RKPD 2016 sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

No	Agenda Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator	Data awal (2014)	Target 2016
Arah Kebijakan RPJPD Tahap ke-3 (2016-2020)					
I. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif,dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat					
1.	Pendidikan	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah	Angka melek huruf	99,59 %	99,70 %
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,17	8,20
II. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan					
2.	Kesehatan	2. Peningkatan akses pelayanan kesehatan	Angka harapan Hidup	71,47	72,00
		3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	- Angka Kematian Ibu (AKI)	101	85
			- Angka Kematian Bayi (AKB)	467	234
		4. Penguatan promotif dan Preventif	- Jumlah Kebijakan Publik yang berwawasan kesehatan	3	4
			- Persentase Kab/Kota yang memiliki kebijakan PHBS	40	50
III. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku					
IV. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan					



No	Agenda Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator	Data awal (2014)	Target 2016
3.	Kedaulatan pangan	5. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	22,35 %	24,35 %
4.	Kedaulatan energi	6. Peningkatan sarana prasarana pendukung infrastruktur dasar, utamanya perumahan dan kesehatan (listrik, air bersih, sanitasi)	Tingkat elektrifikasi	69,3 %	85 %
			RT pengguna air bersih (sambungan rumah)	158.352	174.187
			Persentase rumah tinggal bersanitasi	61,5 %	76 %
		7. Pengembangan energi baru dan terbarukan serta energi ramah lingkungan	Prosentase desa yang menggunakan atau menerapkan energi baru dan terbarukan	33,8%	48%
V. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah					
VI. Meningkatkan akselerasi perkembangan koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah					
VII. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.					
VIII. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia					
IX. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan					
X. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah					
XI. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan					
5.	Industri/kawasan Industri	8. Peningkatan Efisiensi distribusi barang-barang	Tingkat inflasi	7,07 %	3,5% - 4,5%
		9. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	6,21%	7,7% - 8,2%
		10. Pemanfaatan SDA secara bijaksana yang mendukung perekonomian berkelanjutan			
		11. Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat	Tingkat Kemiskinan	6,07%	5,2%



No	Agenda Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator	Data awal (2014)	Target 2016
		12. Perluasan lapangan usaha dan kesempatan pekerjaan yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat pengangguran	3,24%	2,5%
		13. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi	Persentase Jalan dalam kondisi baik	87,05%	89,87%
			Jumlah Kabupaten/Kota yang telah memiliki penerbangan komersial rutin	3 Kab/Kota (Palangka Raya, Sampit dan Pangkalan Bun)	4 Kab/Kota (Palangka Raya, Sampit, Pangkalan Bun dan Muara Teweh)
			Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki dermaga yang terakses pelayaran barang/orang	4	5
6.	Pariwisata	14. Peningkatan promosi dan penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata	Kontribusi PAD sektor pariwisata		
XII. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah					
7.	Revolusi Mental	15. Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	Baik
		16. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat	Predikat Akuntabilitas kinerja	CC/58 (Hampir Baik)	B/60-75 (Baik)
		17. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>good governance</i>)	Opini BPK	WDP *)	WTP

*) opini BPK terhadap pelaksanaan APBD TA. 2013 yang dinilai tahun 2014

